



Jaga Kesinambungan Fiskal Daerah

SAMBAS - Sudah disahkannya APBD Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2020 di Tahun anggaran sebelumnya (2019) diharapkan memaksimalkan serapan anggaran oleh pihak eksekutif.

"Saya kira penting perlu diperhatikan, dalam penyelesaian APBD secara menyeluruh sudah berubah sistemnya, zaman dulu ketok palu (APBD) bisa Maret di tahun anggaran berjalan, tapi sekarang satu atau dua bulan sebelum tahun anggaran, untuk APBD Kabupaten Sambas TA 2020 di Sambas, sudah disahkan pada November 2019," kata Wakil DPRD Kabupaten Sambas, Arifidiar.

Sudah disahkannya APBD TA 2020 di 2019, sebut Ketua

DPD Partai Golkar Sambas tersebut, bisa memberikan waktu kepada eksekutif (Pekab Sambas) untuk merampungkan rancangan itu dan segera bisa mengeksekusinya.

"Dengan demikian, paling tidak Februari 2020, sudah ada action dari Pekab untuk melaksanakan APBD TA 2020. Mana yang belanja langsung, mana yang belanja tak langsung sudah bisa dilaksanakan," katanya.

Dirinya pun menegaskan tak ada alasan lagi cerita kelabakan di akhir tahun atau serapan anggaran sampai tak maksimal. "Kalau sudah begini, kami tak ingin mendengar eksekutif di akhir tahun kelabakan dalam penyerapan anggaran. Dan jangan sampai

terjadi anggaran di tahun ini dikerjakan pada tahun berikutnya," katanya.

Bahkan, atas perintah Bupati Sambas, dalam pemaksimalan penyerapan anggaran. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pekab Sambas, mendekati perayaan hari besar keagamaan, pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan pada momen tersebut, bisa dilaksanakan.

"Ini menyangkut daya beli masyarakat, karena Sambas masih dominan bertumpu pada perputaran uang yang bersumber pada APBD, karena tak ada sektor tambang seperti di Kabupaten Ketapang, atau sektor swasta lain yang bisa mendorong perputaran ekonomi. Artinya APBD masih menjadi

satu-satunya sumber pendorong utama perputaran perekonomian di tengah masyarakat," katanya.

Sehingga dengan maksimalnya dan percepatan penyerapan anggaran akan berdampak bagi perekonomian masyarakat sehingga bisa menjaga fiskal daerah. "Kalau APBD tak cepat, sementara sektor lain belum ada, maka APBD lah yang harus didorong untuk menjaga fiskal daerah," katanya.

Perlu diketahui, DPRD Kabupaten Sambas, pada Jumat (29/11/2019), menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2020. Sejumlah rekomendasi dan catatan disampaikan oleh legislatif agar ditindaklan-

juti pihak eksekutif. Persetujuan DPRD Sambas atas APBD Sambas, diberikan saat rapat paripurna yang dihadiri 36 Anggota DPRD Sambas dalam agenda penyampaian laporan hasil kerja Banggar DPRD atas Raperda APBD TA 2020, permintaan persetujuan dari anggota DPRD secara lisan oleh pimpinan atas Raperda APBD TA 2020 dan Pandangan Akhir Bupati Sambas. DPRD Kabupaten Sambas melalui Badan Anggaran menyampaikan 12 rekomendasi kepada eksekutif. Di antaranya APBD Sambas TA 2020 senilai sekitar Rp1,7 Triliun adalah digunakan untuk pembangunan yang berdampak pada ekonomi rakyat, perbaikan infrastruktur dan SDM. (fah)